

Analisis desa/kelurahan pusat pertumbuhan wilayah sekitar calon ibu kota negara Indonesia

Yudi Wahyudin

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.

Email: yudi.wahyudin@bps.go.id

Abstrak

Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara memberikan harapan peningkatan pembangunan bagi wilayah sekitarnya, terutama pertumbuhan wilayah di tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran ketersediaan fasilitas pembangunan serta mengidentifikasi jumlah desa/kelurahan di tiga kabupaten/kota yang termasuk sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis skalogram dan indeks sentralitas. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan analisis skalogram sebagian besar desa/kelurahan di Kota Balikpapan merupakan pusat pertumbuhan wilayah. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara baru sedikit desa/kelurahan yang merupakan pusat pertumbuhan wilayah. Berdasarkan indeks sentralitas juga menunjukkan desa/kelurahan di Kota Balikpapan sebagian besar sudah merupakan pusat pertumbuhan dan desa/kelurahan di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara baru sedikit yang merupakan pusat pertumbuhan wilayah.

Kata Kunci: Pusat pertumbuhan wilayah; ibu kota negara; skalogram; indeks sentralitas

Analysis of village regional growth center around the prospective capital of the state of Indonesia

Abstract

The election of Kalimantan Timur as the location of the National Capital City provides hope for increased development for the surrounding area, especially regional growth in three districts/municipalities namely Kutai Kartanegara Regency, Penajam Paser Utara and Balikpapan City. This study aims to provide an overview of the availability of development facilities and identify the number of villages in three regencies/ municipalities that are included as regional growth centres. The analytical method used in this research is scalogram analysis and centrality index. The results showed that based on the scalogram analysis, most of the villages in Balikpapan City were centres of regional growth. Meanwhile, in Kutai Kartanegara Regency and Penajam Paser Utara Regency, only a few villages are the centres of regional growth. The centrality index also shows that most of the villages in Balikpapan City are already growth centres. Only a few villages in Penajam Paser Utara and Kutai Kartanegara are centres of regional growth.

Keywords: Regional growth center; state capital; scalogram; centrality index

PENDAHULUAN

Francois Perroux (dalam Tarigan dan Robinson, 2004) telah mengungkapkan bahwa konsep ruang ekonomi melandasi konsep pusat pertumbuhan. Pada konsep ini dinyatakan bahwa, pertumbuhan muncul pada kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang tidak sama sesuai dengan karakter fungsionalnya dan sisi geografisnya. Menurut sisi fungsionalnya, pusat pertumbuhan merupakan lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang menurut sifat hubungannya sama-sama memiliki unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi pada wilayah sekitarnya. Sedangkan dari sisi geografis, pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik, hal ini mengakibatkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di wilayah tersebut dan masyarakat akan datang memanfaatkan fasilitas yang ada di wilayah tersebut. Pendapat terkait pusat pertumbuhan juga disampaikan oleh Hirschman (dalam Adisasmita, 2005), pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan akan memberikan pengaruh pada daerah belakangnya yang disebut sebagai efek polarisasi (*polarization effect*) serta akan memberikan efek peneteskan ke bawah (*trickling down effect*). Polarisasi efek akan semakin kuat dengan adanya pemusatan investasi pada wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Sedangkan *trickling down effect* bisa semakin tumbuh dengan meningkatkan daya tarik pada wilayah sekitarnya.

Penelitian tentang pemusatan wilayah cukup banyak dilakukan diantaranya penelitian Hierarki Wilayah Kota Manado oleh Gunena et al. (2016), menghasilkan pembagian wilayah Manado menjadi 4 orde. Sementara itu Gaffara et al. (2015) melakukan kajian Skalogram Guttman dan indeks Sentralitas Marshall untuk penentuan pusat-pusat pelayanan wilayah. Maulida et al. (2019) melakukan penelitian klasifikasi wilayah dalam makalah Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Melalui Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana menggunakan skalogram dan indeks sentralitas sebagai alat analisisnya. Penelitian terkait pusat pertumbuhan juga dipadukan dengan interaksi wilayah menggunakan Skalogram, Indeks Sentralitas dan Indeks Gravitasi seperti yang dilakukan oleh Emalia dan Farida (2018). Penelitian-penelitian tersebut menentukan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas pendidikan, keagamaan dan ekonomi serta fasilitas lain yang sesuai dengan jenis klasifikasinya menurut level wilayah kecamatan atau kabupaten. Sementara itu penentuan pemusatan dengan level wilayah yang lebih mikro yaitu wilayah desa/kelurahan masih belum banyak dilakukan.

Setelah dilakukan studi selama 3 tahun maka Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dianggap telah memenuhi syarat untuk terpilih sebagai ibu kota negara. Salah satu faktornya adalah karena memiliki risiko bencana yang kecil (Hakim et al., 2020). Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memastikan ibu kota baru berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Isran Noor menyebut Samboja dan Sepaku dipilih berdasarkan hasil penelitian sejumlah pihak terkait (CNN Indonesia, diakses 26 Agustus 2021). Kecamatan Samboja sendiri berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, maka pada penelitian kali ini difokuskan pada tiga kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang merupakan wilayah penyangga calon Ibu Kota yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait kutub-kutub perkembangan wilayah di sekitar calon ibu kota baru. Dengan informasi ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan dan nantinya pembangunan pada wilayah penyangga ibu kota dapat berjalan selaras dengan wilayah inti ibu kota tersebut. Sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah penyangga dengan wilayah ibu kota baru nantinya.

METODE

Analisis skalogram

Analisis skalogram memberikan gambaran hierarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit fasilitas pembangunan dari yang paling banyak sampai paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pertumbuhan dan dalam analisis skalogram untuk penentuan tingkat

pertumbuhan wilayah yang didasarkan pada ketersediaan fasilitas wilayah menurut jumlah dan jenis unitnya (Rodinelli, 1985). Analisis skalogram yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode menuliskan ada atau tidaknya fasilitas (keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan komunikasi) di suatu wilayah, yaitu dengan mengisikan angka 1 bila fasilitas tersebut terdapat pada suatu wilayah dan mengisikan angka 0 bila fasilitas tersebut tidak terdapat di suatu wilayah.

Penentuan Jumlah hierarki/orde dalam Analisis Skalogram menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Banyak Orde} = 1 + 3.33 \log n$$

Keterangan:

n = jumlah desa/kelurahan

Kemudian, dilakukan perhitungan panjang kelas interval. Berikut ini adalah rumus perhitungan panjang kelas interval:

$$\text{Kelas Interval} = \frac{\text{Batas Atas} - \text{Batas Bawah}}{\text{Jumlah Orde}}$$

Dalam menyatakan bahwa hasil uji skalogram sudah mempunyai tingkat kalayakan yang cukup maka digunakan rumus *Coeffisien of Reproducibility* atau (COR) sebagai berikut:

$$COR = 1 - \sum_{N \times K} e$$

Keterangan:

e = Jumlah kesalahan atau error

N = Jumlah subyek atau wilayah yang diteliti

K = Jumlah obyek atau fasilitas yang diteliti

Dalam hal ini koefisien dianggap layak apabila bernilai 0.9 – 1

Indeks sentralitas

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas Marshall menyempurnakan Metode Skalogram dengan Metode Weighted Centrality Index (WCI), yaitu dengan memperbaiki kesalahan yang terjadi, dimana setiap fasilitas diberi bobot, yang mana setiap fasilitas mempunyai bobot sesuai keseluruhan fasilitas yang sama yang dimiliki seluruh wilayah yang dinilai. Index sentralitas suatu wilayah dihitung dari jumlah bobot yang dimiliki. Semakin besar jumlah bobot, wilayah tersebut memiliki hierarki lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Menggunakan asumsi bahwa jumlah total setiap fungsi atau fasilitas pelayanan pada wilayah studi mempunyai sentralitas total 100, maka bobot atau koefisien lokasi dari masing-masing fungsi atau fasilitas pelayanan ditentukan dengan menggunakan rumus (Yadav, 1986):

$$C = \frac{t}{T}$$

Keterangan:

C = Bobot jenis fasilitas

t = Nilai sentralitas tiap jenis fasilitas (diasumsikan nilainya 100)

T = Jumlah satuan tiap jenis fasilitas

Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah hasil Pendataan Potensi Desa Tahun 2020 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan ini menyajikan jumlah/keberadaan fasilitas menurut desa/kelurahan. Objek penelitian adalah desa/kelurahan pada tiga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Jumlah data yang dilakukan penelitian adalah 325 desa/kelurahan.

Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis fasilitas pembangunan yang berada pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 18 fasilitas terpilih yang dianggap mewakili tingkat

pembangunan suatu wilayah. Variabel yang dipilih adalah variabel yang menyatakan jumlah fasilitas yang ada pada desa/kelurahan. Beberapa variabel sejenis dilakukan agregasi ke dalam satu fasilitas guna lebih menyederhanakan analisis. Terdapat lima kelompok fasilitas yaitu: fasilitas keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan komunikasi. Kelompok fasilitas beserta variabel penyusunnya lebih lengkap disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan kelompok variabel dalam penelitian

Jenis Variabel	Kelompok Fasilitas	Keterangan
Tempat Ibadah	Keagamaan	Agregasi seluruh jumlah fasilitas ibadah
TK	Pendidikan	Agregasi jumlah TK Negeri, TK Swasta, PAUD Negeri, PAUD swasta, RA Negeri, RA Swasta
SD	Pendidikan	Agregasi jumlah SD Negeri, SD Swasta, MI Negeri, MI Swasta.
SMP	Pendidikan	Agregasi jumlah SMP Negeri, SMP Swasta, MTs Negeri, MTs Swasta.
SMA	Pendidikan	Agregasi jumlah SMA Negeri, SMA Swasta, MA Negeri, MA Swasta, SMK Negeri, SMK Swasta.
Perguruan Tinggi	Pendidikan	Agregasi jumlah Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta.
Usaha Mikro	Ekonomi	Agregasi seluruh jumlah usaha mikro dan kecil
Bank	Ekonomi	Agregasi jumlah Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta dan Bank Perkreditan Rakyat.
Kelompok Pertokoan	Ekonomi	Jumlah kelompok pertokoan
Tempat Praktek Bidan	Kesehatan	Jumlah praktek bidan
Tempat Praktek Dokter	Kesehatan	Jumlah tempat praktek dokter
Puskesmas Rawat Inap	Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan rawat inap
as Tanpa Rawat Inap	Kesehatan	Jumlah puskesmas tanpa rawat inap
Poliklinik	Kesehatan	Jumlah poliklinik
Rumah Sakit	Kesehatan	Agregasi seluruh rumah sakit
Rumah Bersalin	Kesehatan	Jumlah rumah bersalin
Apotek	Kesehatan	Jumlah apotek
Base Transceiver Station	Komunikasi	Jumlah <i>base transceiver station</i> (BTS)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan fasilitas pembangunan merupakan kunci utama pertumbuhan suatu wilayah dimana pada akhirnya akan memberi efek polarisasi juga pada wilayah sekitarnya. Secara umum fasilitas pembangunan sudah cukup lengkap tersedia pada tiga kabupaten/kota yang berada di sekitar calon ibu kota baru seperti terlihat pada tabel 2. Fasilitas pembangunan paling banyak adalah jumlah usaha mikro sebesar 6.588 usaha mikro dan kecil, jumlah terbanyak kedua adalah fasilitas ibadah sebesar 3.737 tempat ibadah yang merupakan gabungan dari seluruh tempat ibadah menurut agama. Dari total 15.519 fasilitas pembangunan berdasarkan 18 variabel penelitian jumlah fasilitas terbanyak adalah kelompok fasilitas ekonomi sebesar 45 persen yang terdiri dari usaha mikro, bank dan kelompok pertokoan. Sedangkan kelompok keagamaan mempunyai persentase sebesar 24 persen disusul kemudian oleh fasilitas kesehatan, pendidikan dan komunikasi.

Sedangkan jika dilihat menurut wilayah pada tiga kabupaten/kota tersebut persentase fasilitas terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 7.452 buah fasilitas atau sebesar 48 persen, Kota Balikpapan sebanyak 5.899 buah atau sebesar 38 persen dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 13 persen. Secara umum jumlah fasilitas akan mengikuti jumlah penduduk dimana penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan yang tertinggi dari tiga kabupaten/kota tersebut, disusul Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Tabel 2. Jenis dan jumlah fasilitas menurut kabupaten/kota

Jenis Fasilitas	Kabupaten/Kota			Jumlah
	Kutai Kartanegara	Penajam Paser Utara	Balikpapan	
Tempat Ibadah	2.173	633	951	3.757
TK	729	187	512	1.428
SD	531	111	222	864
SMP	203	42	90	335
SMA	117	24	66	207
Perguruan Tinggi	5	-	21	26
Usaha Mikro	2.835	827	2.926	6.588
Bank	89	27	160	276
Kelompok Pertokoan	26	9	126	161
Tempat Praktek Bidan	124	28	54	206
Tempat Praktek Dokter	89	22	87	198
Puskesmas Rawat Inap	24	9	7	40
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	11	2	20	33
Poliklinik	35	5	45	85
Rumah Sakit	3	1	13	17
Rumah Bersalin	6	3	21	30
Apotek	85	38	128	251
Base Transceiver Station	367	100	450	917
Jumlah	7.452	2.068	5.899	15.419

Analisis Skalogram memberikan hasil seperti pada Table 3. Semakin kecil orde menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan pusat pertumbuhan. Dari sebanyak 325 desa/kelurahan yang diteliti, hanya sebagian kecil desa/kelurahan yang termasuk dalam orde berangka kecil yaitu Orde I sampai dengan Orde III. Sebagian besar desa/kelurahan pada tiga kabupaten/kota tersebut termasuk pada orde berangka besar dari Orde IV sampai dengan Orde IX. Hal ini menunjukkan bahwa baru sebagian kecil desa/kelurahan di dua kabupaten tersebut yang merupakan pusat pertumbuhan. Perlu upaya peningkatan fasilitas pembangunan guna menumbuhkan kutub pertumbuhan baru guna meningkatkan geliat pembangunan pada wilayah sekitarnya.

Tabel 3. Jumlah desa/kelurahan menurut orde hasil analisis scalogram di tiga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur

Orde	Kutai Kartanegara	Penajam Paser Utara	Balikpapan	Jumlah
I	-	-	4	4
II	3	3	12	18
III	17	3	15	35
IV	14	4	2	20
V	17	2	1	20
VI	44	10	-	54
VII	89	25	-	114
VIII	47	7	-	54
IX	6	-	-	6
Jumlah	237	54	34	325

Sedangkan jika dilihat lebih rinci pada Tabel 3 kabupaten/kota diperoleh gambaran yang cukup berbeda. Desa/kelurahan di Kota Balikpapan sebagian besar mengelompok pada angka orde yang lebih kecil yaitu berada pada orde I sampai III sedangkan sisanya ada 3 kelurahan yang berada pada orde IV dan V. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagian kecil desa/kelurahan yang berada pada angka orde kecil bahkan tidak ada yang berada pada Orde I. Sebagian besar desa/kelurahan pada dua wilayah tersebut berada pada orde berangka besar. Secara lebih rinci bisa kita lihat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara baru memiliki 22 persen desa/kelurahan yang berada pada Orde II sampai dengan Orde V atau sebanyak 51 desa/kelurahan dari total 237 desa/kelurahan. Begitu pula dengan Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 22 persen yang berada pada Orde II sampai dengan Orde V, sedangkan sisanya berada pada orde yang dengan angka tinggi yaitu orde VI

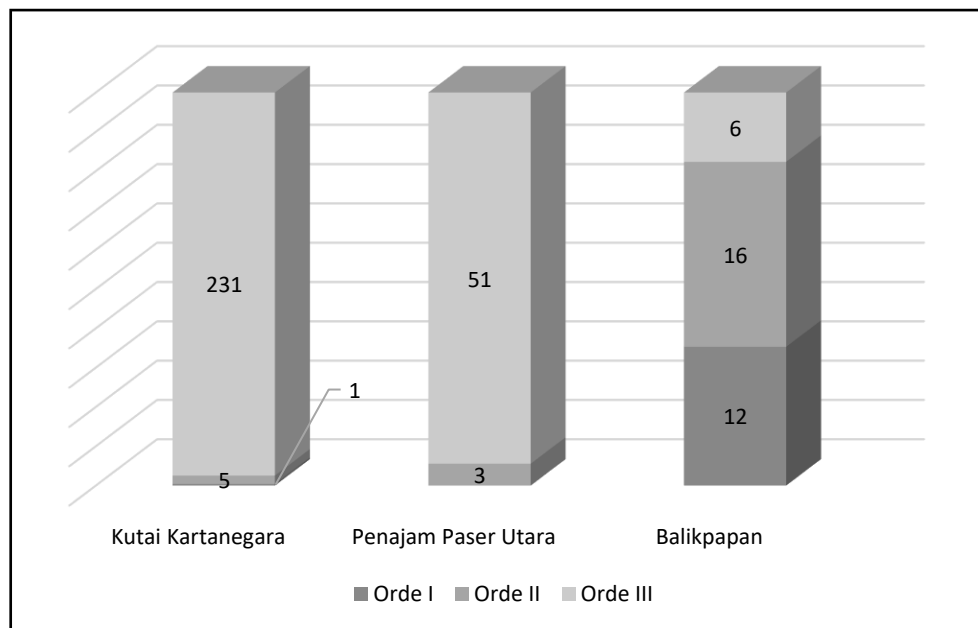
sampai dengan orde IX. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sudah mempunyai cukup banyak pusat pertumbuhan wilayah sampai level mikro, sehingga ketika ibu kota baru terbentuk akan semakin mempercepat pembangunan wilayah secara keseluruhan. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara masih sedikit pusat pertumbuhan wilayah pada level desa/kelurahan. Perlu upaya peningkatan fasilitas pembangunan pada desa/kelurahan sekitar calon ibu kota tersebut demi menyelaraskan dengan pembangunan di wilayah inti ibu kota nantinya.

Guna semakin menguatkan efek polarisasi serta akan efek penetasan ke bawah perlu diidentifikasi pusat pertumbuhan sampai level kecamatan. Pada Tabel 4 dapat dilihat di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya terdapat 3 kecamatan yang memiliki desa/kelurahan yang masuk dalam Orde II yaitu Kecamatan Kota Bangun, Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Sedangkan Kecamatan Samboja yang berbatasan langsung dengan lokasi calon ibu kota, sebagian besar desa/kelurahannya berada pada Orde VII dan VIII. Kecamatan Tabang merupakan kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak berada pada Orde VI sampai IX. Di Kabupaten Penajam Paser Utara kecamatan dengan desa/kelurahan dalam orde tertinggi adalah Kecamatan Penajam dengan 4 desa/kelurahan berada pada Orde II dan Orde III dan kecamatan dengan desa/kelurahan berada pada orde berangka tinggi terbanyak adalah Kecamatan Sepaku. Hal yang ditunjukkan oleh Kota Balikpapan bahwa semua kecamatan telah memiliki desa/kelurahan yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Kecamatan yang telah memiliki desa yang merupakan pusat pertumbuhan tentunya mempunyai peluang lebih untuk meningkatkan pembangunan wilayahnya, berasal dari efek polarisasi dan efek penetasan ke bawah dari pusat pertumbuhan yang telah ada sebelumnya.

Tabel 4. Jumlah desa/kelurahan menurut orde menurut kecamatan berdasarkan hasil indeks sentralitas pada tiga kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kab/Kota	Kecamatan	Orde									Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Kutai Kartanegara	Samboja	-	-	3	1	2	2	11	4	-	23
Kutai Kartanegara	Muara Jawa	-	-	2	-	1	1	3	1	-	8
Kutai Kartanegara	Sanga-sanga	-	-	1	-	-	-	4	-	-	5
Kutai Kartanegara	Loa Janan	-	-	-	2	3	1	2	-	-	8
Kutai Kartanegara	Loa Kulu	-	-	-	1	3	2	8	1	-	15
Kutai Kartanegara	Muara Muntai	-	-	-	1	1	1	5	5	-	13
Kutai Kartanegara	Muara Wis	-	-	-	1	-	-	4	2	-	7
Kutai Kartanegara	Kota Bangun	-	1	-	-	2	4	5	8	1	21
Kutai Kartanegara	Tenggarong	-	1	2	4	-	4	2	1	-	14
Kutai Kartanegara	Sebulu	-	-	2	-	1	1	6	4	-	14
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	-	1	1	1	1	6	7	1	-	18
Kutai Kartanegara	Anggana	-	-	1	-	-	3	4	-	-	8
Kutai Kartanegara	Muara Badak	-	-	2	1	-	3	6	1	-	13
Kutai Kartanegara	Marang Kayu	-	-	1	1	1	3	5	-	-	11
Kutai Kartanegara	Muara Kaman	-	-	1	-	1	4	7	7	-	20
Kutai Kartanegara	Kenohan	-	-	-	1	-	2	2	4	-	9
Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-	-	1	-	1	4	5	-	-	11
Kutai Kartanegara	Tabang	-	-	-	-	-	3	3	8	5	19
Penajam Paser Utara	Babulu	-	1	-	-	-	1	8	2	-	12
Penajam Paser Utara	Waru	-	-	1	-	-	2	1	-	-	4
Penajam Paser Utara	Penajam	-	2	2	-	1	5	11	2	-	23
Penajam Paser Utara	Sepaku	-	-	-	4	1	2	5	3	-	15
Balikpapan	Balikpapan Selatan	2	1	4	-	-	-	-	-	-	7
Balikpapan	Balikpapan Kota	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Balikpapan	Balikpapan Timur	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Balikpapan	Balikpapan Utara	1	4	1	-	-	-	-	-	-	6
Balikpapan	Balikpapan Tengah	1	1	3	1	-	-	-	-	-	6
Balikpapan	Balikpapan Barat	-	2	2	1	1	-	-	-	-	6
Jumlah		4	18	35	20	20	54	114	54	6	325

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Indeks Sentralitas telah memberi gambaran pusat pertumbuhan wilayah penyangga ibu kota. Pada gambar 1 dapat kita lihat hanya terdapat 13 desa/kelurahan atau 4 persen dari total 325 desa/kelurahan yang berada pada Orde I. Desa/kelurahan yang masuk dalam Orde II adalah sebanyak 24 desa/kelurahan atau sebanyak 7 persen. Sebagian besar desa/kelurahan pada ketiga wilayah tersebut berada pada Orde III sebanyak 288 desa/kelurahan atau sebesar 89 persen. Secara umum sama seperti pada analisis skalogram baru sedikit desa/kelurahan di wilayah penyangga calon ibu kota tersebut yang termasuk pusat pertumbuhan wilayah. Perlu dibentuk pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang baru guna mengantisipasi ketimpangan pembangunan yang terjadi antara wilayah inti ibu kota dengan wilayah penyangga nantinya. Peningkatan ketersediaan fasilitas pembangunan merupakan faktor kunci pembentukan pusat pertumbuhan guna menumbuhkan geliat ekonomi yang kedepannya akan mendorong pembangunan wilayah penyangga ibu kota sejajar dengan wilayah inti ibu kota negara.



Gambar 1. Desa/kelurahan menurut orde hasil indeks sentralitas tiga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur

Pada Gambar 1 juga dapat secara rinci orde dari desa/kelurahan menurut kabupaten/kota. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total 237 desa/kelurahan baru satu desa berada pada Orde I, lima desa berada pada Orde II, sisanya 231 berada pada Orde III. Di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada satupun desa/kelurahan yang berada pada Orde I dan hanya 3 desa/kelurahan yang berada pada Orde II sehingga sisanya sebanyak 51 desa/kelurahan berada pada Orde III. Berbeda dengan Kota Balikpapan sebanyak enam desa/kelurahan berada pada Orde I dan 16 desa/kelurahan berada pada Orde II dan sebanyak 12 desa/kelurahan berada pada Orde III. Banyaknya desa/kelurahan di Kota Balikpapan yang termasuk dalam Orde I dan Orde II menunjukkan bahwa wilayah ini telah memiliki pusat pertumbuhan wilayah bahkan sampai level desa/kelurahan. Sehingga ketika ibu kota baru terbentuk pertumbuhan wilayah Kota Balikpapan akan sejalan dengan wilayah inti ibu kota. Sedangkan kedua wilayah lainnya masih belum banyak memiliki wilayah pusat pertumbuhan, perlu menumbuhkan pusat/kutub pertumbuhan wilayah baru supaya tidak terjadi ketimpangan dengan wilayah inti ibu kota nantinya.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih rinci jumlah desa/kelurahan pusat pertumbuhan wilayah perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 5. Sama seperti gambaran secara umum kondisi Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang berbeda dengan dua daerah lainnya. Semua kecamatan memiliki desa/kelurahan yang merupakan pusat pertumbuhan wilayah sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser utara baru sedikit kecamatan yang memiliki desa/kelurahan yang merupakan pusat pertumbuhan. Identifikasi sampai level kecamatan akan memberikan gambaran kecamatan mana yang

perlu upaya pembentukan desa/kelurahan pusat pertumbuhan guna meningkatkan kemajuan wilayahnya.

Tabel 5. Desa/kelurahan menurut orde dan kecamatan hasil indeks sentralitas tiga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kab/Kota	Kecamatan	Orde			Jumlah
		I	II	III	
Kutai Kartanegara	Samboja	-	1	22	23
Kutai Kartanegara	Muara Jawa	-	1	7	8
Kutai Kartanegara	Sanga-sanga	-	-	5	5
Kutai Kartanegara	Loa Janan	-	-	8	8
Kutai Kartanegara	Loa Kulu	-	-	15	15
Kutai Kartanegara	Muara Muntai	-	-	13	13
Kutai Kartanegara	Muara Wis	-	-	7	7
Kutai Kartanegara	Kota Bangun	-	1	20	21
Kutai Kartanegara	Tenggarong	1	2	11	14
Kutai Kartanegara	Sebulu	-	-	14	14
Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	-	-	18	18
Kutai Kartanegara	Anggana	-	-	8	8
Kutai Kartanegara	Muara Badak	-	-	13	13
Kutai Kartanegara	Marang Kayu	-	-	11	11
Kutai Kartanegara	Muara Kaman	-	-	20	20
Kutai Kartanegara	Kenohan	-	-	9	9
Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-	-	11	11
Kutai Kartanegara	Tabang	-	-	19	19
Penajam Paser Utara	Babulu	-	1	11	12
Penajam Paser Utara	Waru	-	-	4	4
Penajam Paser Utara	Penajam	-	2	21	23
Penajam Paser Utara	Sepaku	-	-	15	15
Balikpapan	Balikpapan Selatan	5	2	-	7
Balikpapan	Balikpapan Kota	1	4	-	5
Balikpapan	Balikpapan Timur	1	3	-	4
Balikpapan	Balikpapan Utara	4	1	1	6
Balikpapan	Balikpapan Tengah	1	4	1	6
Balikpapan	Balikpapan Barat	-	2	4	6
Jumlah		4	13	24	288

Berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas diperoleh hasil bahwa Kota Balikpapan sebagai penyangga ibu kota telah memiliki cukup banyak desa/kelurahan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, hal tersebut dilihat sudah cukup banyak desa/kelurahan yang masuk dalam orde dengan angka kecil. Dengan kondisi ini pembangunan di Kota Balikpapan diharapkan semakin pesat ketika ibu kota berdiri karena pusat pertumbuhan wilayah telah tersebar merata. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara masih sedikit desa/kelurahannya yang termasuk dalam pusat pertumbuhan wilayah hal ditunjukkan sedikitnya desa/kelurahan yang berada pada orde berangka kecil. Pada kedua kabupaten tersebut pemindahan ibu kota tentunya akan berimbas positif pada pembangunan wilayahnya. Namun laju pertumbuhan pembangunan tersebut tidak akan optimal jika pada wilayah sekitarnya tersebut belum mempunyai kutub pertumbuhan. Perlu ditumbuhkannya pusat pertumbuhan wilayah baru guna mendorong pertumbuhan wilayah secara menyeluruh. Sehingga pertumbuhan wilayah penyangga akan selaras dengan pertumbuhan wilayah inti ibu kota.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunena et al., (2016) dan Maulida et al., (2019). Dimana penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah dengan analisis skalogram dan indeks sentralitas. Meskipun terdapat perbedaan dalam jenis variabel/fasilitas yang digunakan sebagai dasar pengelompokkan. Namun dapat memberikan gambaran yang nyata terkait kondisi ketersediaan fasilitas terhadap kemajuan pembangunan pada wilayah penelitian.

SIMPULAN

Identifikasi pusat pertumbuhan sampai level desa/kelurahan telah memberikan gambaran kondisi pembangunan wilayah penyangga calon ibu kota negara berdasarkan ketersediaan fasilitas pembangunan.

Berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas telah teridentifikasi bahwa Kota Balikpapan sudah memiliki cukup banyak pusat pertumbuhan wilayah sampai level desa/kelurahan. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara hanya memiliki sedikit desa/kelurahan yang merupakan pusat pertumbuhan wilayah. Perlu upaya penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru pada kedua kabupaten tersebut guna menyongsong pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Sehingga efek pembentukan wilayah pemerintahan baru tersebut akan optimal dirasakan oleh wilayah sekitarnya.

Pembentukan pusat-pusat pertumbuhan wilayah pada daerah penyangga ibu kota nantinya sangat penting untuk dilakukan. Perlu penelitian lebih mendalam lagi terkait aspek sosial dan ekonomi pada wilayah yang akan dijadikan pusat pertumbuhan baru. Sehingga pembentukan pusat pertumbuhan tersebut akan memberikan efek polarisasi dan efek penetasan ke bawah yang optimal pada wilayah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. R., (2005), *Dasar-Dasar Ekonomi wilayah*. Graha Ilmu: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, (2020), *Pendataan Potensi Desa 2020*, Jakarta
- cnnindonesia.com, (2019, 26 Agustus), Gubernur kaltim : Ibu Kota Baru di Kecamatan Samboja & Sepaku, Diakses pada 21 juli 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190826143239-20-424709/gubernur-kaltim-ibu-kota-baru-di-kecamatan-samboja-sepaku>
- Emalia, Z. & Farida, I., (2018), Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung, in *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* (Vol.9, No. 1, pp.61-74)
- Gaffara, G.R, Fathu, A., Fatih, (2015), Kajian Skalogram Guttman Dan Indeks Sentralitas Marshall Untuk Penentuan Pusat- Pusat Pelayanan Wilayah (Studi Kasus: Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara), in *Proceeding Seminar Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi (RetII) Ke-16 Tahun 2021* (pp. 150-153)
- Gunena, A.R., Tilaar, S., Takumansang, E., (2016), Hirarki Wilayah Kota Manado, in *Jurnal SPASIAL* (Vol. 3, No. 3, pp. 116-125)
- Hakim et al., (2020), Pengelolaan Obyek Pariwisata Menghadapi Potensi Bencana Di Balikpapan Sebagai Penyangga Ibukota Negara Baru, in *Jurnal Nusantara* (Vo. 7, No.2, pp. 607-612)
- Maulida, et al., (2020), Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Melalui Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara, in *Jurnal SPECTA* (Vol. 4, No.1, pp.14-21)
- Rondinelli, D. A., (1985), *Applied Methods of Regional Analysis*, Westview Press
- Tarigan, R, (2004), *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Yadav, C. S., (1986), *Concept's international Series in Geography No.3, Perspective in Urban Geography, Volume Sixteen- Urban Planning Policies – Part B – Cross-Cultural Urban Policies*, Concept Publishing Company, New Delhi.